



## **Analisa Bantuan Luar Negeri Inggris dalam Skema Kerjasama Multistakeholder Forestry Program 3 di Jepara**

**Mia Risa Himalia**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

Jepara is one of the biggest sector on furniture products in Indonesia. The Quality of Jepara furniture product has grown to various parts of the world. England is one of the biggest consumer of Jepara furniture products and Europe is part of the consumers too. The High export rates of furniture was not comparable with the implementation of SVLK which has been agreed between Indonesia and Europe. Jepara was not maximally in the implementation of SVLK then England with initiative to provide the assistance to Jepara through the scheme of cooperation with MFP 3 that runs in 2014-2016. The research method used is qualitative explaining what the motive of England in providing assistance to Jepara. Then that motive is analyzed to find the facts behind the attitude from England. To answer the phenomenon, the research using the theory of constructivism. The result shows that the underlying motives of England on providing assistance to Jepara is purely to help Jepara in SVLK ownership, beside that is a concrete act of assistance of England which has the commitment to environment.

**Keywords:** *England, Indonesia, Jepara, International Development Act 2002, foreign aid, MFP, SVLK, motive of England*

### **PENDAHULUAN**

Jepara merupakan sentra furnitur di Indonesia. Produk furnitur yang dihasilkan oleh Jepara ini telah diekspor ke berbagai negara besar salah satunya adalah negara Inggris. Selain memiliki keunggulan dalam ekspor produk furniturnya, Jepara juga didukung dengan kepemilikan hutan yang cukup luas dengan persediaan kayu yang cukup banyak. Adapun luas hutan yang dimiliki Jepara adalah seluas 17.518,164 yang terbagi di sembilan kecamatan di Jepara. Tetapi setelah peneliti menggali informasi atas hutan di Jepara tersebut pemerintah daerah Jepara memberikan pernyataan bahwa hutan di Jepara saat ini masih dalam tahap pemulihan. Mengingat pada masa pemerintahan Soeharto dahulu tingginya tingkat penebangan hutan secara liar atau yang bisa disebut dengan *Illegal logging*. Dari tindakan yang dihasilkan tersebut membuat hutan di daerah Jepara mengalami kerusakan dan menghambat pertumbuhan kayu di hutan Jepara. Selain itu Indonesia juga pernah menduduki sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan dan *illegal logging* tertinggi kedua di dunia. Dari banyaknya masalah-masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia ini membuat Inggris memiliki inisiatif untuk mengajak Indonesia melakukan kerjasama dalam bidang lingkungan.

Kerjasama ini ditandai dengan disepakatinya *Letter of Arrangement*. Dalam kesepakatan ini Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2000. Kerjasama yang terjalin antara Inggris dengan Indonesia ini diberi nama *Multistakeholder Forestry Program* atau yang bisa disingkat dengan MFP. Adapun

program kerja yang dihasilkan dari kerjasama ini bermacam-macam salah satunya adalah terkait pengadaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau yang bisa disingkat dengan SVLK. SVLK sendiri dikhususkan untuk seluruh industri yang berbasis kayu maupun yang menyangkut sektor kehutanan. Adapun tujuan dari adanya SVLK tersebut adalah untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging*. Dengan SVLK ini pemerintah terkait dapat melacak apakah kayu-kayu yang beredar di masyarakat tersebut merupakan hasil dari penebangan yang legal atau tidak. Seruan penerapan SVLK ini digerakkan pemerintah ke seluruh pelosok daerah di Indonesia, salah satunya adalah Jepara. Apalagi Jepara merupakan sentra furnitur yang menggunakan kayu sebagai bahan dasar dari produk Jepara itu sendiri. Melalui skema kerjasama MFP tersebut Inggris memberikan bantuan dana sebesar 10 juta Poundsterling (Embassy Of The Republic Of Indonesia 2015), untuk pengadaan awal SVLK di Jepara.

Kebijakan bantuan luar negeri yang dilakukan Inggris tersebut mengundang tanya, alasannya adalah karena Jepara ini merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang belum maksimal dalam penerapan SVLK yang merupakan kesepakatan yang dibuat antara Indonesia dengan Inggris. Sebelumnya telah dilakukan *pre-research* yang kemudian memberikan bukti bahwa penerapan SVLK di Jepara ini hanya berjalan sebesar 30% saja. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia seperti Surabaya 78%, Bali 60%, Solo 65%, Semarang 63%, Jogjakarta 67% (wawancara dengan Perhutani Jepara, 4 Agustus 2017), Jepara merupakan kota yang jumlah penerapan SVLK nya paling rendah persentasenya. Setelah pemerintah Jepara melakukan survey dan menemukan penyebab dari terhambatnya penerapan SVLK di Jepara yakni salah satunya adalah biaya yang cukup tinggi yang harus disiapkan sebuah industri untuk mengantongi SVLK. Adapun jumlah biayanya adalah sebesar 40-80 juta rupiah. Dengan tingginya biaya yang diperlukan membuat SVLK tidak dapat diimplementasikan secara maksimal oleh industri furnitur di Jepara. Padahal keberadaan SVLK ini sangat penting untuk mendukung pemerintah dalam memerangi tindakan *illegal logging*.

Penelitian ini menggunakan teori konstruktivis, yang mana inti pemikiran dari konstruktivis adalah bahwa dunia sosial termasuk hubungan internasional merupakan hasil dari konstruksi manusia (Sorensen 2005, 307). Teori konstruktivisme merupakan satu-satunya teori yang menganggap penting keberadaan norma. Dengan teori konstruktivisme ini juga digunakan konsep norma dan konsep *logic appropriateness*, dan konsep tersebut sekaligus membantu dalam menjelaskan mengapa Inggris memberikan bantuan kepada Jepara dalam skema *Multistakeholder Forestry Program 3* pada tahun 2014-2016. Dalam teori konstruktivis suatu negara itu bertindak didasarkan pada sesuatu yang dianggap baik dan pantas. Konstruktivisme menganggap bahwa bantuan asing akan menjadi salah satu kebijakan suatu negara yang masih akan terus dilakukan oleh negara yang dianggap maju dalam segi ekonomi, militer. Selain itu, bantuan asing merupakan cerminan dari rasa tanggung jawab dan kewajiban negara-negara maju untuk membantu negara lain yang tidak hanya mengalami masalah dalam bidang ekonomi saja tetapi juga masalah dalam bidang sosial, budaya dan kemanusiaan (Rosyidin 2012, 520).

Konstruktivis merupakan satu-satunya teori yang menganggap penting keberadaan norma dalam keberlangsungan hubungan antar bangsa maupun negara. Norma sendiri diartikan sebagai petunjuk atau pedoman hidup, mengatur perilaku dari masing-masing individu maupun negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara baik dan benar (Husrev 2016, 191). Dalam pembagiannya norma itu terbagi menjadi dua, yang pertama adalah norma tertulis yang mana norma tersebut terwujud dalam naskah teks, undang-undang, dan pasal (Rosyidin, 2015, 70). Yang kedua yakni adalah norma tidak tertulis, yang mana norma ini tidak dapat dilihat dengan indera mata dan tidak berwujud, hanya saja norma ini telah berkembang di masyarakat luas dan selalu diturun-temurunkan

(Rosyidin 2015, 70). Norma itu sendiri masih bisa dibedakan berdasarkan fokusannya. Seperti norma internasional yakni suatu norma yang berkiblat pada nilai atau kaidah yang telah dilakukan oleh aktor internasional, contohnya adalah negara. Yang kedua adalah norma domestik, yang mana norma ini berkiblat pada nilai dan perilaku yang dianut oleh negara tertentu (Rosyidin 2015, 71).

Konstruktivisme memandang bahwa teori kebijakan luar negeri haruslah dengan mempertimbangkan perilaku yang berbasis nilai dan kebiasaan tradisi budaya yang baik atau *Logic Appropriateness* (Henning 1999). *Logic appropriateness* adalah sebuah perilaku atau keyakinan sebagai suatu tindakan yang baik tetapi tindakan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja karena tindakan tersebut telah menjadi sebuah keyakinan dan kebiasaan yang selama ini dianut (Henning 1999). Di dalam *logic appropriateness* ini menghimbau agar pihak-pihak yang terkait harus menyatakan identitas untuk menjaga perilaku dalam sebuah peraturan sosial. *Logic appropriateness* juga berpendapat bahwa suatu perspektif yang melihat tindakan manusia yang didorong oleh sebuah aturan perilaku yang sesuai atau patut untuk dicontoh. March dan Olsen juga berpendapat bahwa *logic appropriateness* ini tidak memandang bahwa tindakan yang dilakukan ini nantinya akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya (March dan Olsen 1999, 7).

Berangkat dari kerangka teori di atas memberikan implikasi bahwa Inggris yang merupakan contoh negara yang mengaut norma domestik dan masuk dalam kategori *logic appropriateness* menganggap dirinya menjadi negara yang memiliki tanggung jawab terhadap negara lain, dan tentunya Inggris merupakan negara yang lebih maju jika dibandingkan dengan Indonesia. Adanya teori tersebut juga memberikan argumen pada penelitian ini yakni Inggris dalam memberikan kebijakan bantuan luar negeri kepada Jepara ini merupakan wujud dari keinginannya untuk membantu Jepara dalam penerapan SVLK secara maksimal guna membantu dalam memerangi *Illegal logging* di Indonesia maupun Jepara.

## **PEMBAHASAN**

Isu terkait lingkungan telah menarik perhatian dunia internasional, dengan banyaknya negara yang peduli lingkungan yang dilakukan dengan cara meratifikasi perjanjian-perjanjian yang terkait isu lingkungan salah satunya adalah Kyoto Protokol. Salah satu negara yang terdorong untuk fokus terhadap isu lingkungan adalah Inggris. Pada abad ke 18 Inggris merupakan salah satu negara yang melakukan revolusi industri. Hal tersebut menimbulkan permasalahan seperti pencemaran lingkungan yang menaruh Inggris di posisi ke delapan dalam peta negara-negara penghasil emisi karbon (BBC, 2007). Kondisi tersebut membuat Inggris melakukan perubahan dengan memfokuskan pada konservasi lingkungan. niat baik Inggris untuk merubah citranya menjadi negara yang mulai memiliki kepedulian terhadap lingkungan ini dibuktikan dengan Inggris mengikuti beberapa konferensi yang berkaitan dengan pembahasan masalah-masalah lingkungan yang sedang berkembang. Selain meratifikasi Kyoto Protokol, Inggris juga turut serta bergabung dalam konferensi seperti Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFCCC) (Foreign & Commonwealth Office, 2012).

Inggris juga meratifikasi Perjanjian Paris yang mana perjanjian tersebut juga mengikat negara-negara agar turut andil dalam menjaga dan melestarikan lingkungan (Foreign & Commonwealth Office, 2012). Inggris merupakan negara contoh negara yang tidak hanya memiliki kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi konsumen produk lingkungan kehutanan. Tingkat konsumsi produk kayu yang dilakukan Indonesia ini mencapai persentase 30%. Maraknya kerusakan lingkungan hutan yang terjadi di Indonesia termasuk Jepara tersebut membuat Inggris untuk meluncurkan kebijakan baru yakni pelarangan masuknya kayu dan produk kayu ilegal ke negaranya. Inggris juga mulai

berhati-hati dalam membeli produk kayu karena adanya kekhawatiran kayu tersebut didapat dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan.

Kebijakan Inggris terhadap lingkungan juga dibuktikan dengan adanya Department for International Development (DFID). DFID merupakan badan atau lembaga resmi Inggris yang fokus terhadap masalah pembangunan dengan memberikan bantuan maupun pinjaman baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek bagi negara yang membutuhkan. DFID berdiri di berbagai bidang salah satunya dalam bidang lingkungan. dalam hal ini DFID membantu negara-negara dalam melakukan pelestarian hutan dengan cara memberikan bantuan baik berupa bantuan finansial maupun bantuan teknis guna melanjutkan komitmen yang telah dibuat oleh Inggris dalam mengatasi *Illegal logging* dan *illegal timber* di Indonesia. untuk Indonesia penyaluran dana dari DFID tersebut diwakili oleh lembaga terkait yakni MFP.

Lembaga bantuan yang digerakkan Inggris untuk membantu Jepara dalam melakukan pelestarian lingkungan tidak hanya DFID melainkan ada juga lembaga bantuan lain yakni UK AID, yang mana UK AID tersebut sama-sama dibentuk Inggris untuk fokus dalam bidang lingkungan. Perdana Menteri Inggris David Cameron memberikan pernyataan bahwa UK AID dibuat untuk menangani masalah-masalah lingkungan seperti mendukung adanya adaptasi hutan, mendukung adanya gerakan pengurangan emisi karbon, deforestasi hutan dan *illegal logging* (The Guardian 2010).

Penelitian ini berargumen bahwa Inggris dalam memberikan bantuan berupa dana dan teknis didasari oleh adanya norma domestik yang telah dianut. Dalam melakukan kebijakan bantuan luar negerinya tersebut Inggris didasari konstitusi yaitu *International Development Act 2002* (IDA). Dalam konstitusi tersebut pada bagian pertama dibahas mengenai macam-macam bantuan dan tujuan dari adanya bantuan tersebut. Jadi dalam membahas bantuan konstitusi ini menjelaskan bahwa bantuan itu dibedakan menjadi 3 yakni ada bantuan finansial, bantuan teknis dan bantuan dalam pengadaan barang. Jika ditarik ke dalam penelitian ini bantuan yang diberikan Inggris kepada Indonesia maupun Jepara ini merupakan wujud dari bantuan Finansial atau bantuan berupa dana. Konstitusi tersebut juga memberikan pernyataan tentang tujuan dari pemberian bantuan tersebut yakni Inggris dalam memberikan bantuan tersebut didasarkan pada keinginannya untuk membantu melanjutkan pembangunan di negara-negara luar Inggris dan juga turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dunia.

Guna memperkuat kebijakan bantuan luar negeri Inggris tersebut, teori konstruktivisme juga memberikan pendapat bahwa bantuan asing itu akan menjadi salah satu kebijakan suatu negara yang akan terus dilakukan oleh negara maju. Dan pernyataan itu telah dibuktikan Inggris bahwasannya dalam melakukan kerjasama dengan Indonesia maupun Jepara tersebut telah berjalan sejak 10 tahun lalu dan 20 tahun kedepan. Adapun motif di balik bantuan yang diberikan Inggris kepada Indonesia melalui DFID juga telah dibahas dalam tulisan *DFID Indonesia-UK Climate Change Unit*. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa anggaran dana yang dibuat Inggris untuk pembangunan Indonesia lebih difokuskan untuk perubahan iklim dan lingkungan (DFID Indonesia-UK Climate Change).

Dana bantuan tersebut diberikan DFID kepada MFP kemudian MFP menyalurkan ke berbagai daerah termasuk Jepara. Dana bantuan Inggris yang diberikan untuk Jepara diakumulasikan pada tahun 2014-2016 telah mencapai jumlah 27 miliar, dan dana bantuan tersebut dikhususkan untuk membantu Jepara dalam penerapan SVLKnya dan pelestarian lingkungan hutan. selain dana tersebut ada juga dana bantuan lain yang diberikan Inggris untuk Indonesia yakni sebesar 100 miliar, dana bantuan ini dikhususkan untuk membantu menangani masalah lingkungan yang sedang terjadi di seluruh Indonesia. sistem dalam pemberian bantuan tersebut sama dengan yang dilakukan lembaga bantuan Inggris UK Aid kepada Indonesia, yakni sama-sama disalurkan melalui MFP.

Dalam penelitian ini ditemukan banyak sekali pernyataan-pernyataan Inggris tentang komitmen terhadap moral. Selain makna bantuan Inggris yang telah dijelaskan oleh konstitusi Inggris (IDA 2002) seperti batuan yang diberikan Inggris tersebut merupakan bantuan luar negeri yang didasari adanya keinginan untuk melanjutkan pembangunan di negara-negara di luar Inggris dan juga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dunia. Selain itu dalam IDA 2002 poin ke sembilan dijelaskan juga terkait Inggris dalam melancarkan bantuan luar negeri guna membantu dalam menyejahterahkan dunia tersebut dibantu oleh badan hukum terkait yang dibantu oleh Kementerian Luar Negerinya untuk menjadi mediator antara Inggris dengan negara lain untuk melakukan perjanjian perihal bantuan luar negeri.

Pernyataan tentang komitmen Inggris juga disampaikan Owen Barder dalam tulisannya yakni, harapan Inggris tidak hanya unggul dalam pemberian bantuan saja tetapi juga harus memiliki konsentrasi dan perhatian terhadap isu-isu lain yang salah satunya merupakan isu lingkungan. Komitmen Inggris terhadap lingkungan juga disampaikan dalam tulisan DFID yang menyatakan bahwa Inggris sejak lama memiliki konsentrasi untuk membuat hutan menjadi bagian dari salah satu fokus kebijakan luar negerinya. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan yang diarah Inggris dalam mengajak negara-negara untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan (DFID 2013, 8).

Pernyataan yang terkait dengan komitmen Inggris juga disampaikan *White Paper* yang dipublikasikan Inggris. Dalam tulisan tersebut dapat ditemukan bahwa Inggris lebih mengutamakan bantuan untuk negara-negara miskin yang pendapatan perkapitanya di bawah standart (Barder TT, 8). Penyaluran bantuan yang dilakukan Inggris untuk Indonesia juga pernah disampaikan oleh Sekretaris DFID yakni Douglas Alexander yang mengatakan bahwa “Dampak dari penggundulan hutan yang tidak terkendali di Indonesia akan terasa di seluruh dunia untuk tahun-tahun yang akan datang. Melalui kerjasama ini Inggris akan berdiri untuk mendampingi Indonesia guna membantu dalam mengelola hutannya, melindungi sumberdaya vitalnya untuk generasi masa depan. Alasan tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang tingkat penggundulan hutannya tertinggi kedua di dunia” (Mongabay 2010).

Komitmen Inggris terhadap lingkungan juga telah dijelaskan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron, David mengatakan bahwa Inggris merupakan contoh negara yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. dalam masa pemerintahan David, Inggris membuat kesepakatan terkait *Greenest Government Ever*, dalam GGE tersebut David membuat kebijakan terkait pembangunan yang berkelanjutan yang nantinya dapat berguna di kehidupan selanjutnya. Dalam hal ini pemerintahan David ingin memiliki konsentrasi terhadap kinerja pemerintahan yang berfokus untuk menghandel isu-isu global salah satunya seperti isu lingkungan.

MFP 3 juga mengelola dana bantuan dari Inggris untuk membantu tercapainya proyek-proyek yang sedang dijalankan. Inggris berharap bahwa dana hibah yang diberikan tersebut dapat membantu dan mendukung proses kerja yang ditujukan untuk perencanaan yang terjalin antara para komunitas, LSM, lembaga lokal, sektor swasta dan pemerintah terkait (Multistakeholder Forestry Program 3 2016). Bentuk dukungan Inggris tersebut juga telah diwakili langsung oleh duta besar Inggris untuk Indonesia, yang mana pada tahun 2016 duta besar Inggris untuk Indonesia tersebut melakukan kunjungan langsung ke Jepara guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan telah dipergunakan dengan baik. Selain itu duta besar Inggris untuk Indonesia juga meninjau perkembangan penerapan SVLK di Jepara. Duta besar Inggris Moazzam Malik menaruh harapan besar kepada Indonesia khususnya Jepara agar dengan kepemilikan SVLK oleh para industri furnitur Jepara dapat membantu Jepara dalam mengembangkan akses kayu di kawasan internasional dan juga agar semakin mudah menjangkau pasar internasional.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil bahwa Inggris merupakan contoh negara maju yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan. komitmen tersebut dibuktikan dengan pemberian bantuan baik bantuan teknis maupun bantuan finansial kepada Indonesia guna membantu dalam menangani isu lingkungan yang sedang terjadi. Dalam memberikan bantuan Inggris didasarkan pada norma domestik yang tertuang dalam *International Development Act 2002*, yang tidak lain adalah konstitusi Inggris. Melalui konstitusi tersebut memberi mandat Inggris untuk memberikan bantuan kepada berbagai negara termasuk membantu dalam menangani isu lingkungan. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Inggris dalam memberikan bantuan finansial kepada Indonesia didasarkan atas komitmennya terhadap lingkungan. Dan hal ini konsisten dengan asumsi konstruktivis bahwa suatu negara bertindak berdasarkan *Logic Appropriateness*.

Bantuan yang diberikan Inggris kepada Jepara melalui skema kerjasama *Multistakeholder Forestry Program* 3 tahun 2014-2016 ini juga menunjukkan bahwa Inggris memiliki perhatian kepada Jepara dengan membantu Jepara dalam penerapan SVLK guna meminimalisir tindakan *illegal logging*. Jika dilihat dari fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian Inggris dalam memberikan bantuan kepada Indonesia maupun Jepara di dasarkan pada motif etis daripada politis.

Dalam teori konstruktivisme telah dijelaskan bahwa bantuan asing merupakan salah satu contoh perilaku yang baik dan pantas untuk dilakukan, meskipun tindakan yang dilakukan tersebut nantinya tidak melayani kepentingan atau keuntungan bagi diri atau negaranya. Ada juga pernyataan pendukung yang menyatakan bahwa suatu negara dalam memberikan bantuan tidak memiliki kepentingan sama sekali, justru kepentingan tersebut ditentukan oleh negara penerima dalam pengalokasian bantuan.

## Referensi

- Act Forester. (2016). *Multistakeholder Forestry Program: About us*. Dalam pada 5 November 2017 <http://www.forestact.com/multistakeholder-forstry-programme-mfp>. Diakses Aschroft, Robert. (2015). *Moving On from The Greenest Government Ever*. Dalam <https://www.the-ies.org/analysis/moving-on-greenest-government>. Diakses pada 13 Maret 2018.
- Barder, Owen. (2007). *Reforming Development Assistance: Lesson from the UK Experience*. Washington: The Brookings Institution
- BBC Indonesia. (2007). *Peta Emisi Negara G20*. Dalam [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2009/12/091207\\_petaemisi.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/12/091207_petaemisi.shtml) diakses pada 20 Februari 2018.
- Department For International Deceit. (2015). *The UK's lose-lose Development Outcomes in Indonesia a World Growth Report*. Dalam [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08979e5274a31e0000d0/61212-corruption\\_evidence\\_paper\\_final\\_16Feb15.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08979e5274a31e0000d0/61212-corruption_evidence_paper_final_16Feb15.pdf). diakses pada 3 Februari 2018.
- Department for International Development. (TT) *DFID Indo-UKCCU*. Dalam <https://www.gov.uk/world/organisations/uk-climate-change-unit>. diakses pada 3 Februari 2018.
- Henning, Ritterberger and Wolfgang Wagner. (1999). *Norms and Foreign Policy: Constructivist Foreign Policy Theory*. Dalam <https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/47193/pdf/tap34a.pdf?sequence=1>. Diakses pada 5 Desember 2017.

- March James and Johan Olsen. (1999). The Logic Appropriateness. Dalam <http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456-e-024>. Diakses pada 4 Desember 2017.
- Mongabay.(2010). *Inggris danai Usaha Pengubahan Menuju Produksi Minyak Kelapa yang Ramah Lingkungan*. Dalam <https://news.mongabay.com/2010/06/inggris-danai-usaha-pengubahan-menuju-produksi-minyak-kelapa-yang-lebih-ramah-lingkungan/>. Diakses pada 25 Februari 2018.
- Multistakeholder Forestry Program. (2016). *Sekilas Program Hibah MFP 3*. Dalam <https://www.mfp.or.id/index.php/id/peluang/hibah> Diakses pada 3 November 2017
- Rosyidin, Mohamad. (2012). Moralitas Dalam Dunia Anarki: Bantuan Luar Negeri dalam Perspektif Konstruktivis. *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.9 No.3 pp. 518-530.
- Sorensen, Robert Jackson dan George. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- The Guardian. (2010) a. *Cameron: I Want Coalition to be The Greenest Government Ever. Indonesia*. Dalam <https://www.theguardian.com/environment/2010/may/14/cameron-wants-greenest-government-ever>. Diakses pada 5 maret 2018.